



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, TELEPON (021) 3511486  
FAKSIMILE (021) 3511486; LAMAN [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : UND-74/PK.4/2023 14 April 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 3 (Tiga) Berkas  
Hal : Undangan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah *Online* Tahap 2 Tahun 2023  
Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar, Kelas Penagihan Pajak Daerah  
Dasar, dan Kelas Penggalan Potensi PDRD

Yth. Kepala Badan/Dinas Pendapatan Daerah  
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) bekerja sama dengan LPEM FEB Universitas Indonesia, LPER FEB Universitas Andalas, PK2ND FEB Universitas Brawijaya, dan P3KD FEB Universitas Sam Ratulangi akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah *Online* Tahap 2 TA 2023 yang akan dilaksanakan secara daring (*online*) menggunakan aplikasi *zoom cloudmeeting* selama 5 (lima) hari dengan jadwal sebagai berikut:

No.	Kelas	Tanggal Pelaksanaan	Jam Pelatihan	Peserta
1.	Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar	22 s.d. 26 Mei 2023	26 Jam	30 orang x 2 kelas
2.	Penagihan Pajak Daerah Dasar	5 s.d. 9 Juni 2023	26 Jam	30 orang
3.	Penggalan Potensi PDRD	22 s.d. 26 Mei 2023	26 Jam	30 orang x 2 kelas
		19 s.d. 23 Juni 2023	26 Jam	30 orang

Bimtek tersebut diprioritaskan bagi pemda peserta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pajak Pusat dan Daerah antara DJP, DJPK, dan Pemda. Namun demikian, bagi pemda yang bukan peserta PKS tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Peserta yang menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dan dinyatakan lulus akan memperoleh Sertifikat Pelatihan Elektronik (*e-sertifikat*).

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara/i kiranya dapat menugaskan pejabat/pegawai untuk mengikuti kegiatan bimtek dimaksud. Untuk mendukung pencapaian pembelajaran yang optimal, peserta mohon dapat dibebaskan dari tugas rutin kantor selama pelaksanaan kegiatan bimtek. Adapun persyaratan peserta dan informasi lainnya tercantum dalam lampiran undangan ini.

Mengingat kuota yang terbatas, diharapkan calon peserta segera melakukan pendaftaran secara daring (*online*) melalui tautan <http://Bit.ly/Bimtek2023-Pajak2>. Untuk pertanyaan lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi narahubung yang tertera dalam lampiran undangan ini.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami menghimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id)) atas keabsahan tandatangan elektronik (*digitalsign*) pada surat/dokumen DJPK dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Call Center* DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, *Hotline Dering* DJPK: 150420.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, diucapkan terima kasih.

Direktur Kapasitas dan  
Pelaksanaan Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



**Ketentuan Umum**  
**Bimbingan Teknis Perpajakan Daerah *Online* Tahap 2 Tahun 2023**

**I. Jadwal Pelaksanaan Bimtek**

No.	Kelas	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Batas Waktu Pendaftaran
1.	Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar	22 s.d. 26 Mei 2023	30 orang x 2 kelas	5 Mei 2023
2.	Penagihan Pajak Daerah Dasar	5 s.d. 9 Juni 2023	30 orang	5 Mei 2023
3.	Penggalian Potensi PDRD	22 s.d. 26 Mei 2023	30 orang x 2 kelas	5 Mei 2023
		19 s.d. 23 Juni 2023	30 orang	5 Mei 2023

Jangka waktu pelaksanaan bimtek *online* selama 5 hari kerja dengan total jam pelatihan sebanyak 26 jam. Setiap hari terdiri dari 2 sesi (durasi 1 sesi yaitu 2 - 3 jam pelatihan).

**II. Persyaratan Peserta**

1. Calon peserta yang diutamakan mendaftar adalah pejabat/pegawai pemda di unit pendapatan daerah yang memiliki tugas terkait dengan penagihan pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah dan penggalian potensi PDRD
2. Calon peserta berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian bimtek *online* sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Calon peserta dibebaskan dari tugas rutin kantor selama pelaksanaan kegiatan bimtek.
4. Berusia maksimum 50 tahun dan mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing.
5. Belum pernah mengikuti Bimtek Kelas Penagihan Pajak Daerah, Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar, dan Penggalian Potensi PDRD yang diselenggarakan oleh DJPK dalam 2 (dua) tahun terakhir.
6. Calon peserta adalah **ASN yang berstatus PNS** dan memiliki ijazah minimal SMA/ sederajat dengan pangkat minimal Pengatur Muda/ golongan II/a.
7. Memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan berupa laptop/komputer, koneksi internet, dan dapat menggunakan aplikasi *zoom cloud meeting*.

**III. Ketentuan Pendaftaran**

1. Setiap Pemda dapat mengirimkan peserta sebanyak 1 (satu) orang pada tiap kelas.
2. Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran secara daring (*online*) melalui tautan <http://bit.ly/Bimtek2023-Pajak2> dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Satu email hanya dapat digunakan untuk mendaftarkan satu orang.
  - b. Pendaftar juga diharuskan mengunggah/melampirkan foto atau scan formulir persetujuan atasan pada halaman pendaftaran daring.
3. Pendaftaran akan ditutup oleh panitia apabila kuota peserta setiap kelas sudah terpenuhi.
4. Peserta yang dinyatakan dapat mengikuti bimtek adalah peserta yang telah lolos proses verifikasi oleh panitia dan ditetapkan dalam daftar peserta definitif oleh Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer.
5. Peserta yang dinyatakan sebagai peserta definitif akan dihubungi kembali oleh panitia paling lambat Tanggal **12 Mei 2023**.
6. Peserta yang dinyatakan sebagai peserta definitif akan dimasukkan ke dalam *Whatsapp Group* bimtek masing-masing kelas.

7. Untuk kepentingan administrasi dan pemberian sertifikat pelatihan, seluruh peserta wajib menyampaikan Surat Tugas mengikuti pelatihan dari instansi masing-masing kepada panitia sebelum pelatihan dimulai.
8. Sertifikat diberikan kepada peserta yang **menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan**, antara lain: mengikuti kelas secara daring **minimal 90%**, mengerjakan pretest dan post test, mengisi form evaluasi setiap hari, serta dinyatakan lulus dengan kriteria hasil post test **minimal mencapai nilai 70**.
9. Peserta akan mendapat biaya bantuan komunikasi berupa pulsa Prabayar.
10. Semua biaya pelaksanaan Bimtek dibebankan pada DIPA DJPK Kemenkeu TA 2023.
11. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami:
  - a. Sdri. Lena (08161873741)
  - b. Sdri. Anissa (085263633625)

#### IV. Ketentuan Tambahan

Bagi peserta yang sudah dinyatakan sebagai peserta definitif namun mengundurkan diri maka akan diberikan **surat teguran tertulis** kepada pimpinan pemda agar menjadi perhatian dan komitmen pada penyelenggaraan bimtek mendatang.

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala



**KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH  
 KELAS PENAGIHAN / JURU SITA PAJAK DAERAH**

<b>NAMA PROGRAM</b>	
<b>Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Penagihan / Juru Sita Pajak Daerah</b>	
<b>DESKRIPSI PROGRAM</b>	<b>TUJUAN PROGRAM</b>
	Bimtek keuda kelas Penagihan/Juru Sita Pajak Daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis, sikap, dan keterampilan teknis penagihan pajak daerah.
	<b>KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI</b>
	Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kesinambungan pembangunan daerah masih belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkapasitas handal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Maka, peningkatan kapasitas aparat pengelola pendapatan daerah sangat diperlukan guna menggali berbagai potensi penerimaan yang terdapat di suatu daerah. Kegiatan penagihan pajak daerah memiliki peranan yang vital dalam penegakan hukum perpajakan daerah karena kegiatan ini dapat memastikan dan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  Memperhatikan fenomena kepatuhan dan perilaku wajib pajak yang kompleks dan beragam serta masih minimnya tenaga juru sita yang tersedia di lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu menyelenggarakan bimtek kelas penagihan pajak daerah sehingga para aparat pemeriksa pajak daerah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat melakukan upaya penegakan hukum secara efektif, objektif, dan terukur sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan daerah.
	<b>SASARAN (TARGET LEARNERS)</b>
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, terutama di bidang penagihan pajakdaerah, yang diproyeksikan untuk menjadi juru sita.	
<b>MODEL PEMBELAJARAN</b>	
	<input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input checked="" type="checkbox"/> <b>NON TATAP MUKA</b> <input type="checkbox"/> <i>e-learning</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat kerja <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pelatihan jarak jauh</b> <input checked="" type="checkbox"/> Magang
<b>STANDAR KOMPETENSI</b>	
Setelah mengikuti bimtek keuda kelas penagihan pajak daerah, peserta diharapkan mampu: 6. Memahami overview pajak daerah dan penagihan pajak daerah 7. Memahami pelaksanaan penagihan pajak daerah secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 8. Memahami kegiatan administrasi penagihan pajak daerah 9. Memahami prosedur tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam rangka penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah 10. Memahami aspek hukum dalam penagihan pajak daerah 11. Memahami strategi dan model penagihan pajak daerah	
<b>KOMPETENSI DASAR</b>	

Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi

6. Memahami overview pajak daerah dan penagihan pajak daerah
  - 1.1 Memahami KUPD dan istilah dalam administrasi perpajakan daerah
  - 1.2 Memahami penagihan pasif
  - 1.3 Memahami profile WPD (utang pajak (prioritas penagihan), rekam jejak pembayaran, kepemilikan aset)
7. Memahami pelaksanaan penagihan pajak daerah secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - 2.1 Memahami substansi peraturan terkait penagihan pajak daerah
  - 2.2 Memahami fungsi-fungsi yang terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak daerah (kondisi dilapangan)
8. Memahami kegiatan administrasi penagihan pajak daerah
  - 3.1 Memahami dokumen dan formulir terkait penagihan pajak daerah
  - 3.2 Memahami fungsi dan kegunaan dokumen-dokumen terkait penagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan (digitalisasi penagihan pajak daerah)
9. Memahami prosedur tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam rangka penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah (digitalisasi penagihan pajak daerah)
  - 4.1 Memahami langkah-langkah teknis, sistem, dan prosedur pelaksanaan penagihan (persiapan, pelaksanaan dan pelaporan)
10. Memahami aspek hukum dalam penagihan pajak daerah
  - 5.1 Memahami konsekuensi dan risiko hukum atas pelaksanaan penagihan pajak daerah
  - 5.2 Memahami dasar-dasar hukum (administrasi, perdata dan pidana) dalam proses penagihan pajak daerah
  - 5.3 Memahami analisis penanganan perkara penagihan dan perbankan
11. Memahami strategi dan model penagihan pajak daerah
  - 11.1 Memahami strategi dan model penagihan pajak daerah
  - 11.2 Memahami penerapan strategi dan model penagihan pajak daerah dalam beberapa situasi dan kondisi

#### LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
1	Materi pokok	6. Overview pajak daerah dan penagihan pajak daerah	2	1
		7. Pelaksanaan penagihan pajak daerah	4	2
		8. Administrasi penagihan pajak daerah	4	3
		9. Prosedur penagihan pajak daerah	6	4
		10. Aspek hukum penagihan pajak dengan surat paksa	4	5
		11. Strategi dan model penagihan pajak daerah	4	6
2	Materi penunjang			
3	Ceramah	Contoh kasus penagihan dan upaya penyelesaiannya	2	7
4	PKL/ studi lapangan	-	-	
5	Outbound	-	-	
6	MFD	-	-	
7	Pengarahannya program	-	-	
8	<i>Action Learning</i>	-	-	
TOTAL JP			26	
LAMA WAKTU UJIAN		Pre test : 30 menit Post test: 30 menit	60 menit	
DILAKSANAKAN DALAM			5 hari	
<b>JENIS DAN JENJANG PROGRAM</b>				

Bimtek kelas pemeriksaan pajak daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar

### PERSYARATAN PESERTA

#### Administrasi

3. ASN di lingkungan unit pengelola pendapatan daerah
4. Usia maksimum 50 tahun
5. Belum pernah mengikuti bimtek perpajakan daerah dalam dua tahun terakhir
6. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing

#### Kompetensi

1. Mampu menggunakan komputer/laptop dan internet, khususnya aplikasi *zoom cloud meeting*
2. Peserta memakai laptop yang terkoneksi dengan internet

### KUALIFIKASI PENGAJAR

#### 4. Kualifikasi Umum

- d. Pendidikan minimum S-1
- e. Memiliki pengalaman mengajar
- f. Mendapatkan penugasan dari instansi asal

#### 5. Kualifikasi Khusus

- c. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan
- d. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Coaching of Coaches*

### REKOMENDASI PENGAJAR

No.	Materi	Rekomendasi Pengajar
1	Overview pajak daerah dan penagihan pajak daerah	Akademisi
2	Pelaksanaan penagihan pajak daerah	Akademisi
3	Administrasi penagihan pajak daerah	Akademisi
4	Prosedur penagihan pajak daerah	Akademisi
5	Aspek hukum penagihan pajak dengan surat paksa	Akademisi
6	Strategi dan model penagihan pajak daerah	Akademisi/Praktisi
7	Contoh kasus penagihan dan upaya penyelesaiannya	Praktisi/Pemda percontohan

Catatan:

Rekomendasi pengajar dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan narasumber.

### BENTUK EVALUASI

Evaluasi Level 1

Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website e-learning DJPK.

Evaluasi Level 2

Peserta menjalani *pre test* dan *post test* untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek

Evaluasi Level 3

-

Evaluasi Level 4

-

### FASILITAS

1. Ruang pembelajaran daring melalui *zoom meeting*
2. Souvenir bimtek berupa penggantian biaya komunikasi, sepanjang belum diberikan dari instansi masing-masing
3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan
4. Pendampingan dari pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan
5. Fasilitator/administrator kegiatan
6. E-Sertifikat bagi peserta yang memenuhi ketentuan bimtek dan dinyatakan lulus.

**KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH  
KELAS PENGGALIAN POTENSI PDRD**

<b>NAMA PROGRAM</b>	
<b>Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	
<b>DESKRIPSI PROGRAM</b>	<b>TUJUAN PROGRAM</b>
	Bimbingan teknis keuangan daerah (bimtek keuda) kelas Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis, wawasan praktis, dan keterampilan teknis terkait penggalian potensi PDRD.
	<b>KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI</b>
	<p>Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kesinambungan pembangunan daerah masih belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah kekurangan sumber dayam manusia yang kompeten dan berkapasitas andal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Maka, peningkatan kapasitas aparat pengelola pendapatan daerah merupakan salah satu alternatif solusi untuk mendukung produktivitas kinerja pemungutan pajak daerah.</p> <p>Pengetahuan dan keterampilan dalam penggalian potensi PDRD sangat diperlukan guna mendukung penyusunan strategi optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan metode maupun teknik saintifik.</p> <p>Memperhatikan urgensi penggalian potensi PDRD terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat dinamis dan kompleks, dipandang perlu menyelenggarakan bimtek kelas penggalian potensi PDRD sehingga para aparat pengelola pendapatan daerah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat merumuskan strategi optimalisasi potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur, adil, dan objektif dari aktivitas ekonomi di daerahnya.</p>
	<b>SASARAN (TARGET LEARNERS)</b>
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait.	
<b>MODEL PEMBELAJARAN</b>	
	<input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input checked="" type="checkbox"/> <b>NON TATAP MUKA (NTM)</b> <input type="checkbox"/> <i>e-learning</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat kerja <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pelatihan jarak jauh</b> <input type="checkbox"/> Magang
<b>STANDAR KOMPETENSI</b>	
Setelah mengikuti bimtek keuda kelas penggalian potensi PDRD, peserta diharapkan mampu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami <i>overview</i> pengantar penggalian potensi PDRD</li> <li>2. Memahami teknis penggalian potensi PBB-P2 dan BPHTB</li> <li>3. Memahami penggalian potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir</li> <li>4. Memahami penggalian potensi retribusi daerah</li> <li>5. Memahami penggalian potensi pajak daerah melalui ekualisasi dengan pajak pusat</li> </ol>	
<b>KOMPETENSI DASAR</b>	

Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi

1. Memahami *overview* pengantar penggalian potensi PDRD
  - 1.1 Memahami latar belakang dilakukan penggalian potensi PDRD
  - 1.2 Memahami sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
  - 1.3 Memahami pendekatan makro dan mikro dalam menghitung potensi pajak daerah
  - 1.4 Memahami prinsip dalam penentuan potensi pajak daerah dan retribusi daerah
  - 1.5 Memahami pembangunan basis data perpajakan daerah
  - 1.6 Memahami profiling dan modernisasi administrasi perpajakan daerah
2. Memahami teknis penggalian potensi PBB-P2 dan BPHTB
  - 2.1. Memahami intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB
  - 2.2. Memahami pendataan, penilaian, dan pemetaan PBB-P2 serta penelitian dan pemeriksaan BPHTB
  - 2.3. Memahami analisis pengembangan potensi PBB-P2 dan BPHTB
3. Memahami penggalian potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir
  - 3.1. Memahami intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir
  - 3.2. Memahami pendataan, penyusunan profil dan pemeriksaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir
  - 3.3. Memahami analisis pengembangan potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir
4. Memahami penggalian potensi retribusi daerah
  - 4.1. Memahami intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu
  - 4.2. Memahami pelaksanaan dan masalah-masalah perhitungan potensi yang dihadapi dalam pemungutan retribusi daerah
  - 4.3. Memahami modernisasi administrasi retribusi daerah
  - 4.4. Memahami analisis pengembangan potensi retribusi daerah
5. Memahami penggalian potensi pajak daerah melalui ekualisasi dengan pajak pusat
  - 5.1. Memahami penghitungan PPh dan PPN secara umum
  - 5.2. Memahami data penghasilan dan peredaran usaha wajib pajak pusat
  - 5.3. Memahami analisis pengembangan potensi pajak daerah melalui rekonsiliasi data pajak pusat dengan basis pajak daerah
    - 5.3.1 Memahami data identitas wajib pajak
    - 5.3.2 Memahami data perizinan
    - 5.3.3 Memahami penghasilan dan peredaran usaha
    - 5.3.4 Memahami data lainnya

**LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI**

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
1	Materi pokok	1. <i>Overview</i> pengantar penggalian potensi PDRD	4	1
		2. Teknis penggalian potensi PBB-P2 dan BPHTB	6	2
		3. Penggalian potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir	6	3
		4. Penggalian potensi retribusi daerah	4	4
		5. Penggalian potensi pajak daerah melalui ekualisasi dengan pajak pusat	4	5
2	Materi penunjang	-	-	-
3	Ceramah	<i>Current issue / knowledge sharing</i>	2	6
4	PKL/ studi lapangan	-	-	-
5	Observasi	-	-	-
6	Pengarahan program	-	-	-
7	<i>Action Learning</i>	-	-	-
TOTAL JP			26 JP	

LAMA WAKTU UJIAN <i>Pre Test</i> : 30 Menit <i>Post Test</i> : 30 Menit		60 Menit
DILAKSANAKAN DALAM		5 hari
<b>JENIS DAN JENJANG PROGRAM</b>		
Bimtek kelas penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar		
<b>PERSYARATAN PESERTA</b>		
<b>Administrasi</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ASN di lingkungan unit pengelola pendapatan daerah</li> <li>2. Usia maksimum 50 tahun</li> <li>3. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing serta dibebastugaskan sementara dari pekerjaan kantor selama mengikuti bimtek</li> </ol>		
<b>Kompetensi</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menggunakan komputer/laptop dan internet, khususnya aplikasi <i>zoom cloud meeting</i></li> <li>2. Peserta memakai laptop yang terkoneksi dengan internet</li> </ol>		
<b>KUALIFIKASI PENGAJAR</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kualifikasi Umum</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Profesional/praktisi di bidangnya</li> <li>b. Memiliki pengalaman mengajar</li> <li>c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal</li> </ol> </li> <li>2. <b>Kualifikasi Khusus</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan</li> <li>b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti <i>Coaching of Coaches</i></li> </ol> </li> </ol>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Lain-lain:</b> Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi moderator/pengajar/narasumber yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi)</li> </ol>		
<b>REKOMENDASI PENGAJAR</b>		
No.	Materi	Rekomendasi Pengajar
1	<i>Overview</i> pengantar penggalian potensi PDRD	Akademisi
2	Teknis penggalian potensi PBB-P2 dan BPHTB	Akademisi/praktisi
3	Penggalian potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir	Akademisi/praktisi
4	Penggalian potensi retribusi daerah	Akademisi
5	Penggalian potensi pajak daerah melalui ekualisasi dengan pajak pusat	Akademisi/praktisi
6	<i>Current issue</i>	Praktisi/Pemda percontohan
<p>Catatan: Rekomendasi pengajar dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan narasumber.</p>		
<b>AKTIVITAS/KEGIATAN BIMTEK</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembelajaran diselenggarakan dengan metode sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ceramah</li> <li>b. Tanya jawab</li> <li>c. Diskusi</li> </ol> </li> <li>2. Peserta disarankan menggunakan laptop/<i>personal computer</i> (PC) yang terhubung dengan kamera dan jaringan internet.</li> </ol>		
<b>BENTUK EVALUASI</b>		
<p>Evaluasi Level 1 Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website e-learning DJPK.</p>		

Evaluasi Level 2  
Peserta menjalani *pre test* dan *post test* untuk menguji kompetensi peserta sebelum dan sesudah bimtek

Evaluasi Level 3

-

Evaluasi Level 4

-

### **FASILITAS**

1. Ruang pembelajaran daring melalui *zoom meeting*
2. Souvenir bimtek berupa penggantian biaya komunikasi, sepanjang belum diberikan dari instansi masing-masing
3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan
4. Pendampingan dari pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan
5. Fasilitator/administrator kegiatan
6. E-Sertifikat bagi peserta yang memenuhi ketentuan bimtek dan dinyatakan lulus.

**KERANGKA ACUAN PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS KEUANGAN DAERAH  
KELAS PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH**

<b>NAMA PROGRAM</b>	
<b>Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah</b>	
<b>DESKRIPSI PROGRAM</b>	<b>TUJUAN PROGRAM</b>
	Bimtek keuda kelas pemeriksaan pajak daerah bertujuan membekali peserta bimtek dengan pengetahuan konseptual/teoritis, sikap, dan keterampilan teknis pemeriksaan pajak daerah. Program bimtek ini sepenuhnya diselenggarakan secara <i>online</i> dengan metode pembelajaran jarak jauh.
	<b>KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI</b>
	Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kesinambungan pembangunan daerah masih belum sepenuhnya dapat dioptimalkan karena berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkapasitas handal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Maka, peningkatan kapasitas aparat pengelola pendapatan daerah sangat diperlukan guna menggali berbagai potensi penerimaan yang terdapat di suatu daerah. Kegiatan pemeriksaan pajak daerah memiliki peranan yang vital dalam penggalian potensi penerimaan pajak daerah karena kegiatan ini dapat memastikan dan mengamankan potensi-potensi penerimaan yang ada. Memperhatikan kondisi pemeriksaan yang sangat dinamis dan kompleks, dipandang perlu menyelenggarakan bimtek kelas pemeriksaan pajak daerah sehingga para aparat pemeriksa pajak daerah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas pemeriksaan secara efektif, objektif, dan terukur sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
	<b>SASARAN (TARGET LEARNERS)</b>
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, terutama di bidang pemeriksaan pajak daerah, yang diproyeksikan untuk menjadi tenaga pemeriksa.	
<b>MODEL PEMBELAJARAN</b>	
	<input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM) <input checked="" type="checkbox"/> <b>NON TATAP MUKA (NTM)</b> <input type="checkbox"/> <i>e-learning</i> <input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat kerja <input checked="" type="checkbox"/> <b>Pelatihan jarak jauh</b> <input type="checkbox"/> Magang <input type="checkbox"/> Pertukaran ASN dengan pegawai swasta
<b>STANDAR KOMPETENSI</b>	
Setelah mengikuti bimtek keuda kelas pemeriksaan pajak daerah, peserta diharapkan mampu:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami <i>overview</i> Pemeriksaan Pajak Daerah</li> <li>2. Memahami aspek hukum dalam pemeriksaan pajak daerah</li> <li>3. Memahami metode, teknik, dan persiapan pemeriksaan pajak daerah</li> <li>4. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah</li> <li>5. Menyusun kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan pajak daerah (studi kasus)</li> </ol>	
<b>KOMPETENSI DASAR</b>	
Kompetensi dasar yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami <i>overview</i> pemeriksaan pajak daerah             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 memahami konsep pajak daerah dan KUPD</li> </ol> </li> </ol>	

1.2 memahami ketentuan dan jenis pajak daerah (kebijakan UU No.1 Tahun 2022 dan PMK 207 dan 208 Tahun 2018)

1.3 memahami gambaran umum pembukuan dan pemeriksaan

2. Memahami aspek hukum dalam pemeriksaan pajak daerah

2.1 memahami hak dan kewajiban wajib pajak daerah

2.2 memahami kewenangan dan kewajiban pemeriksa pajak daerah

2.3 memahami rahasia jabatan, wakil, dan kuasa wajib pajak daerah

2.4 memahami aspek hukum administrasi

2.5 memahami aspek pidana

3. Memahami metode, teknik, dan persiapan pemeriksaan pajak daerah

3.1 memahami tahapan pemeriksaan pajak daerah (observasi lapangan)

3.2 memahami kegiatan-kegiatan dalam tahap persiapan pemeriksaan

3.3 memahami metode pemeriksaan

3.4 memahami teknik dan prosedur pemeriksaan

4. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah

4.1 melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan

4.2 melaksanakan penyelesaian pemeriksaan

5. Menyusun kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan pajak daerah (studi kasus)

5.1. menyusun kertas kerja pemeriksaan pajak daerah

5.2. menyusun laporan hasil pemeriksaan pajak daerah

#### LAMA BIMTEK EFEKTIF DAN DAFTAR MATERI

No.	Kegiatan	Nama Materi	Jam Pelajaran	Sekuen/ Urutan
1	Materi pokok	1. Overview pemeriksaan pajak daerah	2	1
		2. Aspek Hukum dalam pemeriksaan pajak daerah	2	2
		3. Metode, teknik, dan persiapan pemeriksaan pajak daerah	5	3
		4. Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	5	4
		5. Kertas Kerja dan laporan hasil pemeriksaan pajak daerah (studi kasus)	10	5
2	Materi penunjang	-	-	-
3	Ceramah	<i>Current issue / knowledge sharing</i>	2	6
4	PKL/ studi lapangan	-	-	-
5	Observasi	-	-	-
6	Pengarahan program	-	-	-
7	<i>Action Learning</i>	-	-	-

TOTAL JP

26 JP

LAMA WAKTU UJIAN

*Pre Test* : 30 Menit

*Post Test* : 30 Menit

60 Menit

DILAKSANAKAN DALAM

5 hari

#### JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Bimtek kelas pemeriksaan pajak daerah ini merupakan bimtek tingkat dasar

#### PERSYARATAN PESERTA

**Administrasi**

1. ASN di lingkungan unit pengelola pendapatan daerah
2. Usia maksimum 50 tahun
3. Belum pernah mengikuti bimtek kelas pemeriksaan pajak daerah dalam dua tahun terakhir
4. Peserta harus mendapatkan penugasan dari instansi masing-masing

**Kompetensi**

1. Mampu menggunakan komputer/laptop dan internet, khususnya aplikasi *zoom cloud meeting*
2. Peserta memakai laptop yang terkoneksi dengan internet

**KUALIFIKASI PENGAJAR****1. Kualifikasi Umum**

- a. Profesional/praktisi di bidangnya
- b. Memiliki pengalaman mengajar
- c. Mendapatkan penugasan dari instansi asal

**2. Kualifikasi Khusus**

- a. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan
- b. Memiliki kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Coaching of Coaches*

**3. Lain-lain:**

Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi moderator/pengajar/narasumber yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi)

**REKOMENDASI PENGAJAR**

No.	Materi	Rekomendasi Pengajar
1	Overview Pemeriksaan Pajak Daerah	Akademisi
2	Aspek Hukum dalam pemeriksaan pajak daerah	Akademisi
3	Metode, Teknik, dan persiapan pemeriksaan pajak daerah	Akademisi
4	Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah	Akademisi/Praktisi
5	Kertas Kerja dan laporan hasil pemeriksaan pajak daerah (studi kasus)	Akademisi/Praktisi
6	<i>Current issue</i>	Praktisi/Pemda percontohan

**Catatan:**

Rekomendasi pengajar dapat mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan narasumber.

**BENTUK EVALUASI****Evaluasi Level 1**

Evaluasi penyelenggaraan dan pengajar melalui website e-learning DJPK.

**Evaluasi Level 2**

Peserta menjalani *pre test* dan *post test* untuk menguji peningkatan kompetensi sebelum dan sesudah bimtek

**Evaluasi Level 3**

-

**Evaluasi Level 4**

-

**FASILITAS**

1. Ruang pembelajaran daring melalui *zoom meeting*
2. Souvenir bimtek berupa penggantian biaya komunikasi, sepanjang belum diberikan dari instansi masing-masing
3. Materi pembelajaran diberikan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diunduh melalui tautan yang disediakan
4. Pendampingan dari pengajar pada saat simulasi/praktik/latihan
5. Fasilitator/administrator kegiatan
6. E-Sertifikat bagi peserta yang memenuhi ketentuan bimtek dan dinyatakan lulus.

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala



### Formulir Persetujuan Atasan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Nomor Whatsapp : .....

Menyatakan setuju dan berkomitmen mendukung keikutsertaan pejabat/pegawai di bawah ini untuk mengikuti Bimbingan Teknis Keuangan Daerah secara Daring (*Online*)

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Status : PNS/CPNS \*Coret yang tidak perlu  
Instansi : .....  
Kab/Kota : .....  
Nomor Whatsapp : .....  
Kelas Bimtek : .....  
Tanggal Bimtek : .....

....., 2023  
Pejabat yang menugaskan,

.....  
.....

#### Catatan:

1. Pendaftaran peserta dilakukan melalui tautan <http://bit.ly/Bimtek2023-Pajak2>.
2. Batas waktu pendaftaran peserta paling lambat tanggal 5 Mei 2023.
3. Peserta tidak dikenakan biaya.
4. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi narahubung kami:
  - a. Sdri. Lena (08161873741)
  - b. Sdri. Anissa (085263633625)

Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

